

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Siswanto

Nama Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, M.AP

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



Pendahuluan

Transformasi digital mendorong pemerintah untuk menerapkan e-government sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapannya adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diarahkan untuk mewujudkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, SIRUP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan menjadi salah satu instrumen dalam mendukung keterbukaan informasi pengadaan. Namun, pelaksanaan pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi beberapa kendala, antara lain realisasi pengadaan yang belum mencapai 100% serta masih ditemukan kekeliruan dalam penginputan data. Selain itu, terdapat permasalahan terkait keterampilan operator, ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan dengan rencana yang tercantum dalam SIRUP, serta pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang/jasa yang belum optimal.

Data Empiris

Tabel 1. Rekapitulasi Perencanaan dan Realisasi Anggaran Sekretariat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025

No	Tahun Anggaran	Jumlah RUP		Nilai Total	Realisasi	Persentase (%)
1.	2022	743	paket	70.633.857.735	18.896.692.679	27%
2.	2023	546	paket	94.897.211.460	53.287.418.296	56%
3.	2024	310	paket	37.536.302.952	23.934.965.746	64%
4.	2025	414	paket	60.126.034.289	44.670.049.523	74%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Kabupaten Sidoarjo belum mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan dalam proses entry data masih terdapat kekeliruan dalam penginputan sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengadaan. Dengan adanya Aplikasi SIRUP seharusnya menjadi alat pengendali strategis yang memastikan bahwa pengadaan tepat waktu, tidak tumpang tindih, dan tidak melanggar aturan. Namun kenyataan di lapangan sering jauh berbeda dari idealnya. Banyak RUP yang tidak berjalan efektif dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Gab Masalah

1. Keterampilan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan aplikasi dengan maksimal, sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan pengadaan.
2. Kurang komitmentnya dalam waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan waktu perencanaan yang ada dalam SIRUP sehingga berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran.
3. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang/jasa.

Penelitian Terdahulu

“Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Kota Balikpapan” oleh Aby Raavi Fadillah Basuki (2024) dijumpai hasil bahwa mitra program SiRUP berkomunikasi dengan baik, karena masing-masing instansi koordinator intens. Komitmen para pihak sangat baik, dan masing-masing instansi mematuhi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari segi sumber daya fasilitas sarana prasarana dalam kondisi baik

“Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur” oleh Ilham Ferdiansyah (2025) dijumpai hasil bahwa aplikasi SIRUP memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan proses pengadaan serta mentransparasikan proses pengadaan yang sedang dilaksanakan, dan juga penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur telah memiliki payung hukum yang jelas namun penerapan aplikasi SIRUP harus meningkatkan sosialisasi kepada pengguna aplikasi, meningkatkan sistem dari aplikasi SIRUP serta penambahan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola aplikasi SIRUP.

Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai” oleh Syamsiah Hasyim (2022) dijumpai hasil efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sudah efektif, mulai dari input, proses, dan output. Input dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Proses penggunaan aplikasi dibuktikan dengan adanya panduan penggunaan aplikasi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara dalam proses menjalankan aplikasi SiRUP, terlebih dahulu pengimputan SIRUP harus menyiapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang telah disusun yang akan menjadi acuan pengimputan RUP

Teori

Teori Implementasi menurut **Edward III** Memiliki Empat indikator dalam mengukur Implementasi sebagai berikut :

Komunikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

Sumber Daya, mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

Disposisi, dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

SiRUP

Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

SiRUP

Metode

Metode Penelitian menggunakan Kualitatif Deskriptif

Lokasi Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Fokus Penelitian pada Implementasi Aplikasi SIRUP

Penentuan Informan dengan Teknik Non Random Sampling menggunakan Purposive Sampling

Informan :

- Admin PPE
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Admin RUP
- Pendamping Bag PBJ

Pengumpulan Data :

- Observasi partisipasi pasif
- Wawancara
- Dokumentasi

Sumber Data :

- Data Primer (Hasil observasi dan wawancara)
- Data Sekunder (Peraturan, Dokumen, Laporan, dan Arsip)

Analisis Data :

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data
- Penyajian Data
- Penarikan Kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Pada indikator komunikasi pada penelitian Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dijumpai hasil bahwa komunikasi telah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Sidoarjo kepada pegawai internal maupun kepada OPD terkait. Sehingga dengan komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin secara vertical maupun horizontal diharapkan dapat mengurangi kendala pengisian SIRUP oleh OPD terkait.

Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal, khususnya pada aspek sumber daya manusia. Meskipun jumlah pegawai secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan organisasi, komposisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai dengan kebutuhan ideal karena masih terdapat kekurangan pada jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja pejabat fungsional menjadi tinggi dalam menangani paket pengadaan, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas implementasi SIRUP. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pejabat fungsional serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Disposisi

Indikator disposisi dalam implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana dengan baik, yang ditunjukkan melalui komitmen pimpinan, pejabat pengadaan, dan pengelola aplikasi SIRUP dalam melaksanakan penginputan, pembaruan, serta pengelolaan data Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar pejabat fungsional, khususnya pada jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya, belum mengikuti pelatihan manajerial, teknis, maupun fungsional.

Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, pengelola Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, dan operator perangkat daerah, serta pelaksanaan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, koordinasi antarunit kerja dalam penyelesaian kendala teknis maupun administratif mampu mendukung kelancaran proses penginputan, pembaruan, dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Pada indikator **komunikasi**, penyampaian informasi mengenai implementasi SIRUP telah dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, koordinasi, dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah sehingga informasi yang diterima relatif jelas dan konsisten. Pada indikator **sumber daya**, sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan akses aplikasi SIRUP telah tersedia dengan memadai, namun dari sisi sumber daya manusia masih terdapat kekurangan jumlah Pengelola PBJ, yaitu hanya tersedia 14 orang dari kebutuhan 35 orang, sehingga beban kerja pegawai menjadi tinggi. Pada indikator **disposisi**, para pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam melaksanakan implementasi SIRUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada indikator **struktur birokrasi**, pelaksanaan SIRUP telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), serta koordinasi antarunit kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan sistem. Dengan demikian, implementasi SIRUP di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup efektif, namun masih diperlukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar pelaksanaan SIRUP dapat berlangsung lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

